



Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research

Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach>



Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Aparatur Desa Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada 15 Desa di Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut)

Dea Puspita¹, Nugraha², Arvian Triantoro³

¹²³Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPEB,
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
Correspondence: E-mail: deapuspita22@upi.edu

ABSTRACT

This study aims to describe the level of education, work experience, understanding of village financial reports, and the effect of education level and work experience of village officials on understanding village financial statements. The method used is descriptive verification method with a quantitative approach. The research sample consisted of 60 village officials in 15 villages, Banyuresmi sub-district, Garut Regency with a sampling technique using total sampling. The research instrument used a data analysis questionnaire using multiple regression. The results of this study are the level of education is in the quite effective category, work experience is in the effective category, and understanding of financial statements is in the very good category. Education level and work experience have a positive and significant effect on understanding village financial statements. Therefore, village officials need to attend complete and comprehensive village financial management training in order to improve their competence in understanding village financial management, especially understanding village financial reports, and so that the resulting financial reports provide complete and timely information.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 1 July 2023

First Revised 1 August 2023

Accepted 26 August 2023

First Available online 31 August 2023

Publication Date 31 August 2023

Keyword:

Education Level, Work Experience, Understanding of Village Financial Reports

1. INTRODUCTION

Desa merupakan salah satu lembaga sektor publik di pemerintahan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki ciri khas nya sendiri. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa akan menerima bantuan dana sebesar 10% dari APBN. Dimana dana tersebut akan langsung sampai ke desa secara bertahap tanpa perantara yang menyebabkan penerimaan desa meningkat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Desa perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan dana desa. Hal tersebut dilakukan mengingat besarnya dana desa yang bersumber dari APBN dan sumber pendapatan lainnya yang memerlukan pengawasan dan pembinaan yang baik dalam pengelolaannya. Serta pemerintah desa yang harus mempertanggungjawabkan dana desa yang dikelolanya kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kepada masyarakat.

Dengan adanya dana desa, dana tersebut dapat dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Namun dalam pengelolaan dana desa terdapat beberapa masalah yang sering terjadi di kebanyakan desa. Salah satu masalah yang sering terjadi di desa – desa yaitu terkait sumber daya manusia, dimana terdapat ketidaksiapan pemerintah desa untuk membuat dokumen perencanaan desa berupa RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa yang merupakan syarat untuk dicairkannya dana desa dan juga dokumen laporan pertanggungjawaban.

Terdapat fenomena bahwa di Kabupaten Garut khususnya di Kecamatan Banyuwesmi masih banyak yang terlambat dibandingkan desa-desa lainnya, ketika mengumpulkan persyaratan pencairan anggaran dana desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Garut Asep Jaelani, menyatakan bahwa kurangnya kesadaran pemerintah desa terhadap persyaratan yang harus disiapkan untuk mencairkan dana desa yaitu laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan desa.

Selain di Kabupaten Garut, kasus keterlambatan pencairan dana desa akibat terlambatnya pengumpulan laporan pertanggungjawaban juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kementerian Keuangan mengungkapkan realisasi penyaluran dana desa hingga 7 Juni 2021 baru mencapai 32,5 persen atau senilai Rp23,11 triliun dari total pagu Rp72 triliun. Pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran dana desa menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi penyaluran dana desa (Antarnews, 2021).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Wandiana mengatakan, ada dua persoalan sehingga membuat Anggaran Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa di KBB belum turun. Sesuai amanat Pemendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, syarat untuk pencairan ADD Pemdes harus menyerahkan susunan APBdes. Sementara faktanya, dari 165 desa di KBB baru 23 desa yang diverifikasi (APBdes-nya) oleh DPMD (iNewsJabar, 2021).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana mengatakan, ada beberapa permasalahan terlambatnya penyaluran Dana Desa (DD). Yaitu karena adanya keterlambatan pada saat penetapan alokasi DD per desa. Selain

itu, juga karena ada keterlambatan pedoman penyusunan APBDes yang mengakibatkan penetapannya juga terlambat (SuaraCirebon.com, 2021).

Rendahnya tingkat pemahaman terhadap laporan keuangan, ini menyebabkan laporan keuangan terlambat ketika dikumpulkan untuk pencairan dana desa. Terkait dengan hal tersebut maka setiap pengelola keuangan harus memiliki pemahaman yang baik mengenai dokumen-dokumen persyaratan untuk pencairan dana desa, salahsatunya memiliki pemahaman mengenai laporan keuangan. Agar laporan keuangan yang dipublikasikan dapat disajikan secara wajar sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga tidak menyesatkan pembaca dan pengguna laporan.

Tanpa pemahaman laporan keuangan dapat menyebabkan laporan keuangan yang dipublikasikan terdapat kesalahan dalam penyajian angka, tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak sesuai dengan pelaporan, dan tidak tepat waktu dalam penyampainnya sehingga berdampak buruk bagi pengguna laporan itu sendiri. Ketika terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan, maka pencairan dana desa akan terhambat karena salah satu syarat dilakukannya pencairan dana desa adalah dengan mengumpulkan laporan keuangan.

(Makalalag et al., 2017) menyebutkan bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah desa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju masyarakat yang adil dan merata, dengan turut bertanggung jawab terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan penggunaan dana desa.

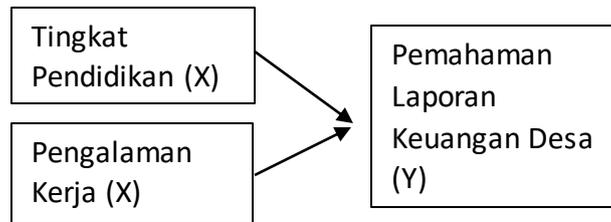
Ketidakhahaman aparatur desa terhadap pengelolaan keuangan desa menjadikan pendidikan serta pengalaman kerja sebagai upaya untuk menangani kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan desa. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman akan laporan keuangan desa. (Kalimandhanu, 2014) mengungkapkan bahwa pemahaman sebagian aparat pemerintah desa terhadap mekanisme pengelolaan keuangan desa masih rendah. Rendahnya tingkat pendidikan aparat desa yang berpengaruh pada rendahnya kualitas SDM membuat pemerintah desa tidak maksimal dalam mengelola keuangan dana desa. Tidak hanya tingkat pendidikan, pengalaman kerja aparatur desa juga mempengaruhi pemahaman laporan keuangan desa. Dalam pekerjaan perlu adanya suatu pengalaman yang menjadi persyaratan dengan tujuan bahwa karyawan tersebut tidak canggung untuk dapat menempatkan diri secara tepat dalam bermacam keadaan serta mampu menghadapi tantangan dengan penuh tanggung jawab.

Namun hasil penelitian diatas bertentangan dengan hasil penelitian (Budiarti et al., 2021) bahwa secara parsial tingkat pendidikan dan pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa. Disebabkan karena tidak semua pegawai yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, paham dan bisa menyelesaikan permasalahan dalam laporan keuangan daerah. Ini disebabkan oleh penempatan yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil penelitian sehingga hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan dengan beberapa perbedaan dan persamaan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja aparatur desa terhadap pemahaman laporan keuangan desa. Oleh karena itu, maka dapat dibuat kerangka pemikiran yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Model Hubungan Antar Variabel Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis “Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Aparatur Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman laporan keuangan desa.

2. METHODS

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden menggunakan instrumen berupa kuesioner.

Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur desa di 15 Desa Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. Teknik sampling yang digunakan yaitu menggunakan sensus atau sampling jenuh dimana seluruh anggota populasi di bawah 100 dijadikan sampel semua sebagai subjek yang dipelajari atau sebagai responden pemberi informasi (Sugiyono, 2019). Sehingga sampel dalam penelitian ini terdiri dari 60 aparatur desa di 15 desa Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. Masing – masing desa hanya diambil sampel sebanyak 4 yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan kaur perencanaan.

Teknik pengumpulan data dengan metode survey menggunakan kuesioner. Skala yang digunakan adalah numerical scale dengan lima alternatif jawaban.

Uji kualitas intrumen dengan uji validitas dan realibilitas. Analisis data menggunakan analisis statistic deskriptif. Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji linearitas. Pengujian hipotesis menggunakan model regresi multiple.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Hasil dari penyebaran kuesioner yang dilakukan pada 60 aparatur desa di 15 desa Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dengan sampelnya yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan kaur perencanaan kemudian dibuat tabulasi data sehingga diperoleh gambaran umum setiap variabel. Secara umum, tingkat pendidikan aparatur desa dengan persentase sebesar 20% sebagian besar berada pada kategori cukup efektif. Kemudian pengalaman kerja dengan persentase sebesar 70% sebagian besar berada pada kategori efektif. Sedangkan pemahaman laporan keuangan desa dengan persentase sebesar 50% hampir setengahnya berada pada kategori sangat baik.

Dengan demikian, para aparatur desa Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut sudah mampu memahami laporan keuangan desa sehingga sesuai dengan yang sudah ditentukan dan tepat waktu. Hal ini sesuai dengan teori stewardship dan teori kompetensi. Teori stewardship menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para pengelola (stewards) termotivasi untuk tujuan – tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi (principals). Sedangkan teori kompetensi menyatakan bahwa kompetensi pengetahuan dan keahlian cenderung lebih nyata atau tampak dipermukaan sebagai salah satu karakteristik yang dimiliki manusia.

Namun, tingkat pendidikan aparatur desa Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut pada umumnya masih memiliki kekurangan dalam kompetensi. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata – rata yang diperoleh pada indikator kompetensi yaitu sebesar 3,26 dimana ini merupakan nilai rata – rata terendah. Kemudian untuk pengalaman kerja sudah berada dalam kategori efektif. Sedangkan untuk pemahaman laporan keuangan desa pada umumnya masih memiliki kekurangan dalam memahami proses dan elemen laporan keuangan desa.

Uji instrumen dalam penelitian menggunakan software IBM SPSS Versi 26. Hasil uji validitas variabel tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan pemahaman laporan keuangan desa diperoleh nilai pearson correlation untuk setiap item pernyataan lebih besar dari 0,254 sehingga pernyataan dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hasil uji reliabilitas variabel tingkat pendidikan diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,892, variabel pengalaman kerja diperoleh nilai sebesar 0,807, dan variabel pemahaman laporan keuangan desa diperoleh nilai sebesar 0,882 sehingga data dinyatakan reliabel karena nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$.

Hasil uji normalitas diperoleh nilai Asymp. Sig sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hasil uji multikolinieritas diperoleh nilai VIF sebesar 1,828 lebih kecil dari 10. Hal ini berarti bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini tidak terdapat korelasi dalam model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas tingkat pendidikan diperoleh nilai Sig 0,065 lebih besar dari 0,05 dan hasil uji heteroskedastisitas pengalaman kerja diperoleh nilai Sig 0,163 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji linearitas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,057 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa hubungan antara variabel X1 dan X2 dengan Y adalah linear.

Pengujian hipotesis menggunakan regresi multiple yang dihitung menggunakan software IBM SPSS Versi 26 dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Multiple

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error			
1 (Constant)	5.698	3.646		1.563	.124
Tingkat Pendidikan (X1)	.337	.108	.365	3.105	.003
Pengalaman Kerja (X2)	.628	.170	.435	3.692	.000

a. Dependent Variable: Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Y)

Berdasarkan tabel 1, maka persamaan regresi multiple pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 5,698 + 0,337X_1 + 0,628X_2$$

Persamaan regresi tersebut yaitu bahwa nilai konstanta (a) sebesar 5,698 artinya jika tingkat pendidikan dan pengalaman kerja nilainya adalah 0, maka besarnya nilai pemahaman laporan keuangan desa adalah 5,698.

Berdasarkan hasil persamaan regresi multiple (berganda) tersebut diketahui bahwa: nilai koefisien tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif sebesar 0,337. Hal ini menunjukkan jika tingkat pendidikan yang baik maka pemahaman laporan keuangan desa akan berbanding lurus dengan tingkat pendidikannya.

Tabel 2.
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	476.542	2	238.271	31.119	.000 ^b
	Residual	436.441	57	7.657		
	Total	912.983	59			

a. Dependent Variable: Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Y)

b. Predictors: (Constant), Pengalaman Kerja (X2), Tingkat Pendidikan (X1)

Berdasarkan tabel 2 diperoleh hasil nilai F_{hitung} sebesar 31,119 sedangkan nilai F_{tabel} pada taraf signifikansi dengan $N1 = K = 2$, $N2 = n-k-1 = 60-2-1 = 57$ menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 3,16. Dengan demikian maka hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak, H_1 diterima, artinya regresi berarti dan dapat digunakan untuk menyimpulkan hasil penelitian.

Tahap selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien regresi (uji t) untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa variabel tingkat pendidikan (X1) diperoleh t_{hitung} sebesar 3,105 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,67155. Maka dengan hal tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pemahaman laporan keuangan desa. Dan variabel pengalaman kerja (X2) diperoleh t_{hitung} sebesar 3,692 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,67155. Maka dengan hal tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap pemahaman laporan keuangan desa.

Penelitian ini mendukung penelitian (Murina, 2017) yang menyampaikan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman kerja memiliki peran penting dalam pemahaman laporan keuangan desa.

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan aparatur desa di Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut sebagian besar berada pada kategori cukup efektif yang berarti aparatur desa memiliki kekurangan dalam kesesuaian dan kompetensinya. Sedangkan untuk pengalaman kerja berada pada kategori efektif yang berarti sudah efektif dalam hal masa/waktu kerja, tingkat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki, serta kemampuan dalam peralatan kerja.

Pemahaman laporan keuangan desa pada aparatur desa di Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut sebagian besar berada pada kategori sangat baik yang berarti aparatur desa sudah sangat baik dalam memahami logika akuntansi, elemen laporan keuangan, dan proses laporan keuangan desa.

Tingkat pendidikan dan pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman laporan keuangan desa di Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. Hal ini

berarti bahwa semakin efektifnya tingkat pendidikan dan pengalaman kerja aparatur desa maka pemahaman laporan keuangan desa juga akan meningkat.

Berdasarkan hasil pembahasan, pada variabel tingkat pendidikan ditemukan bahwa indikator kompetensi memiliki nilai rata – rata terendah. Oleh karena itu, para aparatur desa perlu untuk mengikuti pelatihan pencatatan laporan keuangan desa agar dapat meningkatkan kompetensinya dalam memahami laporan keuangan desa.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan adanya tambahan variabel bebas, seperti pelatihan dan fasilitas kantor. Sehingga bisa mengetahui lebih banyak variabel – variabel yang memiliki implikasi terhadap pemahaman laporan keuangan desa.

5. AUTHORS' NOTE

The authors declare that there is no conflict of interest regarding the publication of this article. Authors confirmed that the paper was free of plagiarism.

6. REFERENCES

- Budiarti, D., Anjaya, A. T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Pengalaman Kerja dan Pemahaman Akuntansi Aparatur Desa terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 1, 26–27.
- Doli, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Pengalaman Kerja Aparatur Desa Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada). *Repository Universitas Flores*.
- Kalimandhanu. (2014). Studi Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Perangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ilmu Pemerintahan*, 1, 2008–2022.
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15334>
- Murina, S., & Rahmawaty. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Dan Pengalaman Kerja Aparatur Desa Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(3), 111–120.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Kedua)*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional